



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT

RILPPD

RINGKASAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT
TAHUN 2024



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RILPPD)

I. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dasar pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut:

Tabel I.1
Capaian Indikator Kinerja Makro Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 dan 2024

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO	CAPAIAAN KINERJA TAHUN 2023	CAPAIAAN KINERJA TAHUN 2024	PERUBAHAN (%)
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia	71,13	71,36	0,323
2	Angka Kemiskinan	2,71	2,59	-4,428
3	Angka Pengangguran	4,86	4,88	27,415
4	Pertumbuhan Ekonomi	2,50	5,47	117,063
5	Pendapatan Per Kapita	83.117.360.000,00	91.207.870.000,00	9,734
6	Ketimpangan Pendapatan	0,199	0,201	1,005

Adapun untuk penjelasan secara rinci terkait dengan capaian indicator makro di atas adalah sebagai berikut :

1.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

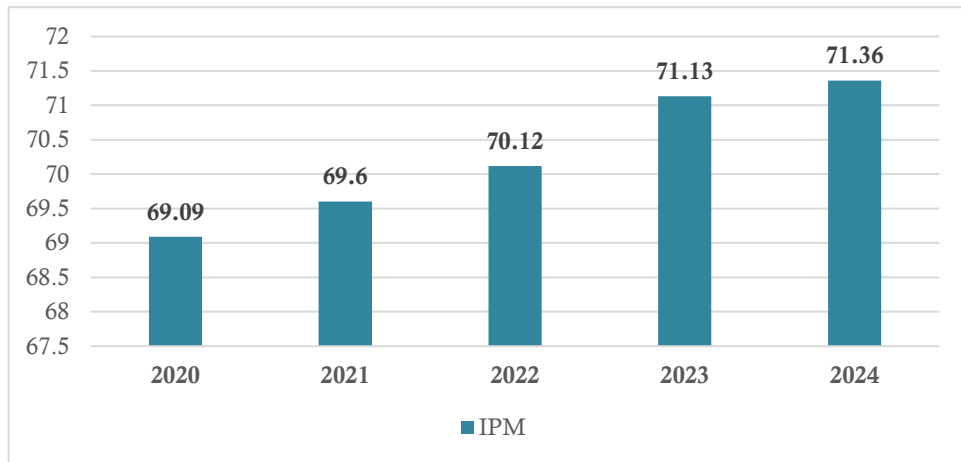
IPM merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia di suatu wilayah. Meskipun tidak mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, namun IPM dinilai mampu mengukur dimensi pokok dari pembangunan manusia. Konsep pembangunan manusia diukur dengan menggunakan pendekatan tiga dimensi dasar manusia, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, serta standar hidup yang layak. Dimensi umur panjang dan sehat diwakili oleh indikator harapan hidup saat lahir. Dimensi pengetahuan diwakili oleh indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Sementara itu, dimensi standar hidup layak diwakili oleh pengeluaran per kapita. Ketiga dimensi ini terangkum dalam suatu indeks komposit yang membentuk IPM.

Nilai IPM Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2024 sebesar 71,36 dan jika dibandingkan dengan capaian di tahun 2023 yaitu sebesar 71,13 mengalami peningkatan sebesar 0,32 %. Jika dilihat dari segi perkembangan antar waktu selama 5 tahun terakhir bahwa capaian IPM Kabupaten Bangka Barat di Tahun 2024 merupakan capaian tertinggi dan untuk

capaian terendah selama kurun waktu 5 tahun terakhir adalah pada tahun 2020 sebesar 69,09.

Jika dilihat dari grafik di bawah ini bahwa capaian IPM Kabupaten Bangka Barat setiap tahunnya terus mengalami peningkatan yang positif yang menunjukkan adanya perbaikan kualitas di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi di Kabupaten Bangka Barat.

Grafik I.1
Perkembangan IPM Kabupaten Bangka Barat Kurun Waktu 2020-2024



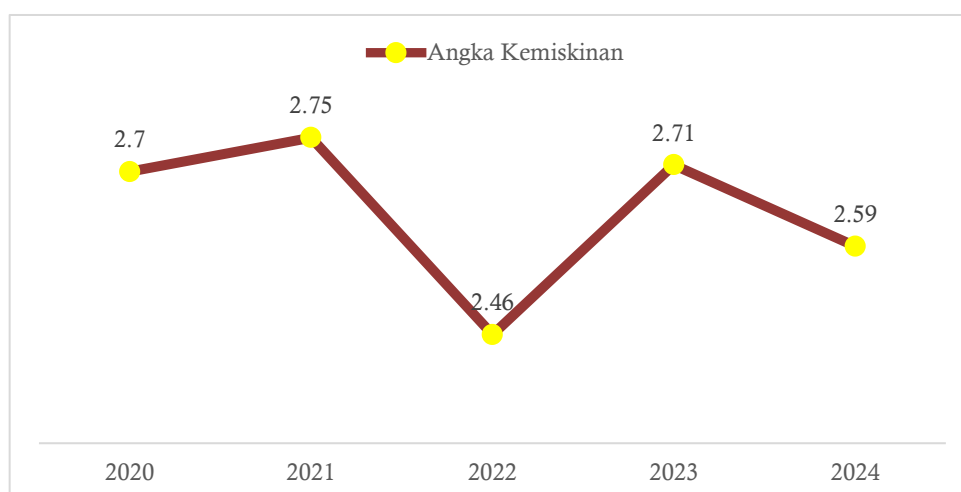
Sumber : Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka Tahun 2025

1.2. Angka Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi perhatian serius dari pemerintah. Penanggulangan kemiskinan yang komprehensif memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha (sektor swasta) dan masyarakat, merupakan pihak-pihak memiliki tanggungjawab yang sama terhadap penanggulangan kemiskinan.

Angka Kemiskinan Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2024 sebesar 2,59 dan jika dibandingkan dengan capaian di tahun 2023 yaitu sebesar 2,71 mengalami penurunan sebesar - 4,42%. Jika dilihat dari segi perkembangan antar waktu selama 5 tahun terakhir bahwa capaian Angka Kemiskinan Kabupaten Bangka Barat cenderung fluktuatif di mana untuk capaian angka kemiskinan terendah berada pada tahun 2022 yaitu sebesar 2,46 sedangkan untuk capaian tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 2,75.

Grafik I.2
Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Bangka Barat
Kurun Waktu 2020-2024



Sumber : Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka Tahun 2025

Jika di lihat dari grafik di atas bahwa capaian angka kemiskinan Kabupaten Bangka Barat fluktuatif di mana jika di lihat dari segi trend cenderung mengalami penurunan. Capaian angka Kemiskinan di tahun 2020 hingga tahun 2021 cenderung meningkat dan kemudian di tahun 2022 mengalami penurunan yang sangat tajam dan kemudian mengalami peningkatan kembali di tahun 2023 dan Kembali menurun di tahun 2024.

1.3. Angka Pengangguran

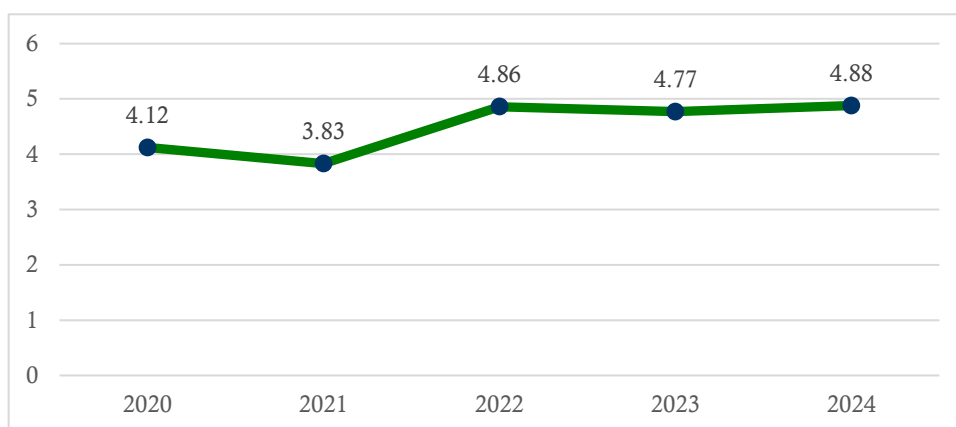
Angka pengangguran dilihat dari indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Sementara pengangguran adalah mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Semakin rendah tingkat pengangguran, maka dapat dikatakan tingkat ekonomi disuatu daerah semakin baik/maju, sekaligus merupakan tanda keberhasilan pemerintah dalam pembangunan bidang ketenagakerjaan.

TPT Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2024 sebesar 4,77 dan jika dibandingkan dengan capaian di tahun 2023 yaitu sebesar 4,88 mengalami peningkatan sebesar 2,31%. Jika dilihat dari segi perkembangan antar waktu selama 5 tahun terakhir bahwa capaian TPT Kabupaten Bangka Barat cenderung fluktuatif di mana untuk capaian TPT terendah berada pada tahun 2021 yaitu sebesar 3,83 sedangkan untuk capaian tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebesar 4,88.

Grafik I.3

Perkembangan TPT Kabupaten Bangka Barat Kurun Waktu 2020-2024



Sumber : Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka Tahun 2025

1.4. Pertumbuhan Ekonomi

Untuk mengukur capaian pembangunan khususnya dibidang ekonomi, salah satu indikator yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi. Angka pertumbuhan ekonomi diperoleh dari data pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK). PDRB ADHK (rill) menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun. Pertumbuhan yang positif menggambarkan bahwa perekonomian mengalami kemajuan dibandingkan tahun sebelumnya, sebaliknya pertumbuhan yang negatif menggambarkan bahwa perekonomian mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel I.2

Laju Pertumbuhan Riil PDRB Kabupaten Bangka Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 (persentase)

KATEGORI	LAPANGAN USAHA	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,53	0,01	0,18	0,21	0,16
B	Pertambangan dan Penggalian	-13,87	10,11	0,10	-2,89	-2,67
C	Industri Pengolahan	-7,00	-4,46	-1,03	0,02	0,50
D	Pengadaan Listrik dan Gas	19,30	8,54	-3,58	0,20	0,15
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,50	3,97	0,15	0,05	0,14
F	Konstruksi	-1,46	1,71	0,10	0,13	-1,67
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-6,17	5,81	0,39	0,25	-3,76
H	Transportasi dan Pergudangan	-12,99	8,29	0,49	0,40	0,16

KATEGORI	LAPANGAN USAHA	2020	2021	2022	2023	2024
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-0,65	6,29	0,44	0,55	0,15
J	Informasi dan Komunikasi	18,32	5,92	0,37	0,56	0,35
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	-0,44	5,36	0,38	0,52	0,08
L	Real Estate	5,02	4,29	0,35	0,32	0,13
M,N	Jasa Perusahaan	-9,11	4,09	0,35	0,25	0,19
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,63	4,64	-0,93	0,30	0,29
P	Jasa Pendidikan	-0,77	1,86	0,13	0,23	0,42
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,07	9,24	0,13	0,23	-0,85
R,S,T,U	Jasa lainnya	-4,69	2,20	0,32	0,41	0,35
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		-5,37	0,20	2,00	2,52	5,47

Sumber : Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka Tahun 2025

Pada tahun 2024, dari 17 kategori lapangan usaha pembentuk PDRB, terdapat 4 kategori lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negatif, sementara 10 kategori lapangan usaha mengalami penurunan atau pertumbuhan yang negatif dan 3 kategori lapangan usaha mengalami peningkatan. Tiga kategori lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Industri, Informasi dan Komunikasi dan Jasa Lainnya. Sementara lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negatif tertinggi adalah pada Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.

Grafik I.4
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangka Barat
Kurun Waktu 2020-2024



Sumber : Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka Tahun 2025

Berdasarkan publikasi BPS, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Barat di Tahun 2024 mengalami kenaikan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Barat di Tahun 2024

sebesar 5,47% mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu yaitu sebesar 2,52% atau sebesar 2,95 point.

Jika dilihat dari segi perkembangan antar waktu selama 5 tahun terakhir bahwa capaian Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangka Barat cenderung meningkat di mana untuk capaian Pertumbuhan Ekonomi terendah berada pada tahun 2020 yaitu sebesar -5,43 sedangkan untuk capaian tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebesar 5,47.

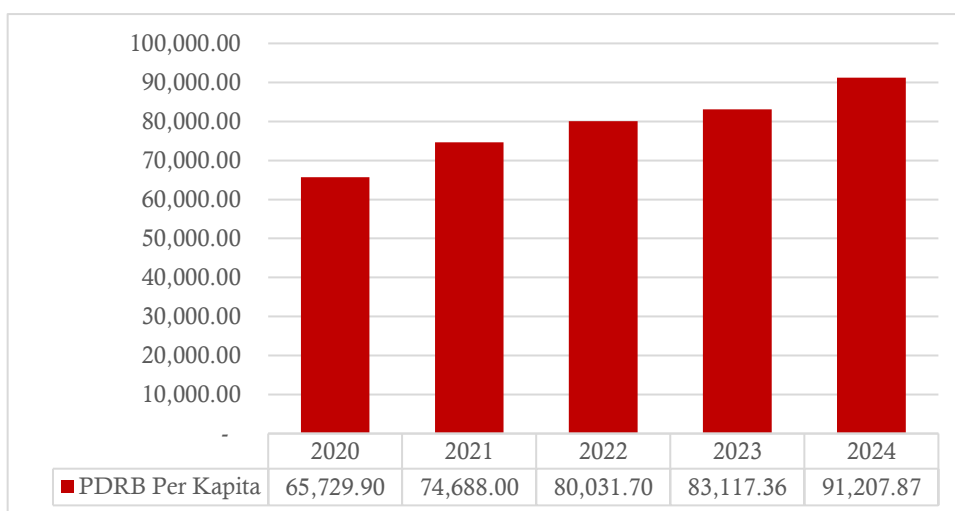
1.5. Pendapatan Per Kapita

PDRB per kapita merupakan salah satu indikator makro sebagai tolak ukur tingkat kesejahteraan dan kemakmuran penduduk di suatu wilayah yang dibandingkan dengan wilayah lain. PDRB per kapita diperoleh dengan membagi PDRB suatu daerah dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Berdasarkan publikasi BPS Kabupaten Bangka Barat, untuk nilai PDRB per kapita Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp 91.207.870.000,00 Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 dengan nilai PDRB per kapita sebesar Rp 83.117.360.000,00 maka terjadi kenaikan sebesar 9,73% di Tahun 2024. Selama 5 (lima) tahun terakhir, nilai PDRB per kapita Kabupaten Bangka Barat menunjukkan perkembangan yang positif atau terus meningkat kecuali di Tahun 2020 yang disebabkan oleh pandemi Covid-19.

Grafik I.5

Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Bangka Barat Kurun Waktu 2020-2024



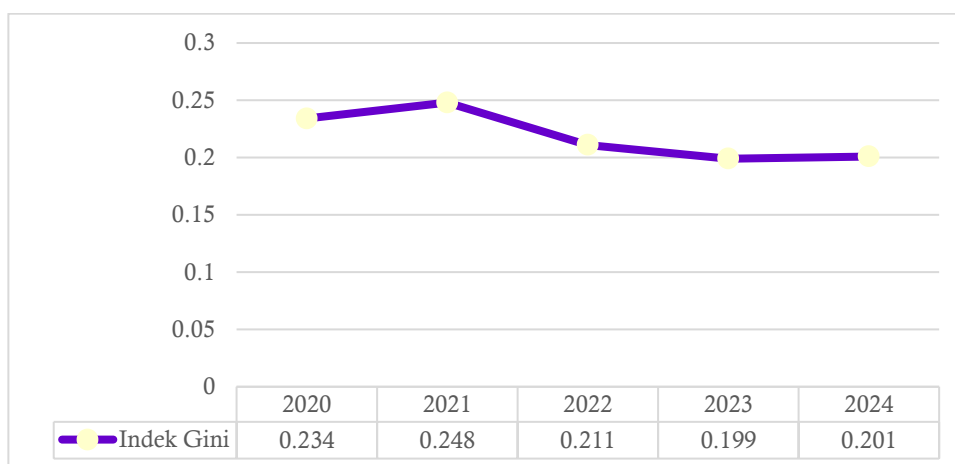
Sumber : Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka Tahun 2025

1.6. Ketimpangan Pendapatan

Dalam pengukuran statistik, dikenal pula Indeks Gini atau *Gini Ratio* yang merupakan salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Dalam mengukur tingkat ketimpangan di Indonesia, BPS menggunakan data pengeluaran sebagai proksi pendapatan. Berdasarkan konsep BPS, *Gini ratio* adalah salah satu ukuran ketimpangan pengeluaran yang menggunakan nilai yang berkisar antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai *gini ratio* yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi.

Indeks Gini Kabupaten Bangka Barat selama 5 (lima) tahun terakhir secara trend menunjukkan penurunan. Pada Tahun 2024 Indeks Gini Kabupaten Bangka Barat sebesar 0,201 meningkat jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar 0,199. Capaian Indeks Gini Kabupaten Bangka Barat terendah terjadi di tahun 2023 yang jika dibandingkan selama tahun 2020 hingga 2024.

Grafik I.6
Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Bangka Barat Kurun Waktu 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

2. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/ informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang.

2.1. BIDANG URUSAN PENDIDIKAN

a. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan pendidikan yang diperoleh Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2023 dan 2024

No.	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Rumus	Capaian 2023	% Kinerja	Capaian 2024	% Kinerja
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD	6.998,00	97,48	10.002,00	101,69
		Jumlah anak usia 5-6 tahun pada provinsi bersangkutan	7.179,00		9.836,00	
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sedang belajar di sekolah dasar	26.649,00	106,65	25.568,00	104,98
		Jumlah anak usia 7-12 tahun pada provinsi bersangkutan	24.987,00		24.355,00	
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sedang belajar di sekolah menengah pertama	11.530,00	91,28	12.130,00	93,78
		Jumlah anak usia 13-15 tahun pada provinsi yang bersangkutan	12.632,00		12.934,00	
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat/ sedang belajar di pendidikan kesetaraan	1.591,00	51,17	1.121,00	57,37
		Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada provinsi yang bersangkutan	3.109,00		1.954,00	

b. Realisasi Belanja Urusan Pendidikan

Realisasi belanja urusan Pendidikan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Realisasi Anggaran Urusan Pendidikan Tahun 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN		
I	PENDIDIKAN				77,016,890,240		
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	4,600,950,000		
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD		125,000,000		
			Pengelolaan Dana BOP PAUD		3,988,000,540		
			Pengadaan Perlengkapan PAUD		27,000,000		
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		284,420,000		
			Penambahan Ruang Kelas Baru		723,600,000		
			Pembangunan Ruang Guru/Ka. Sekolah/TU		474,900,000		
			Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD		90,000,000		
			Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		100,000,000		
			Pengadaan Mebel PAUD		105,368,000		
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD		105,000,000		
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU (SD)	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	442,700,000
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)		889,470,000
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU (SD)		61,000,000			
		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah (SD)		125,000,000			
		Pengadaan Mebel Sekolah (SD)		871,374,000			
		Pengadaan Perlengkapan Sekolah		260,020,000			
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		141,000,000			

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		102,600,000
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		230,000,000
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		9,732,740,000
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		81,550,000
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		60,000,000
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		23,598,560,000
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		10,000,000
			Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar		1,133,056,700
			Pembangunan Ruang Kelas Baru (SD)		1,441,220,000
			Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SD)		1,800,000
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (SD)		2,024,600,000
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU (SMP)		848,774,000
			Pembangunan Laboratorium (SMP)		1,837,700,000
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		155,500,000
			Pengadaan Mebel Sekolah		186,000,000
			Pengadaan Perlengkapan Sekolah		135,410,000
			Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		51,287,000
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama		151,000,000
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		552,870,000

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		243,000,000
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		3,758,280,000
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan SMP		39,300,000
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		50,000,000
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		10,145,060,000
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		5,000,000
			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik		1,800,000
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	10,000,000
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		6,048,000,000
			Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan		966,980,000

c. Permasalahan yang dihadapi

Dalam pelaksanaan kinerja di bidang Pendidikan tentunya memiliki beberapa permasalahan yang di hadapi oleh Dinas teknis. Adapun untuk permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a. Lokasi PKBM yang terbatas jauh dari tempat tinggal serta minimnya dukungan keluarga menjadi salah satu faktor pendorong masih rendahnya angka kesetaraan;
- b. Terbatasnya penganggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten;
- c. Belum maksimalnya penyediaan tenaga kependidikan yang dianggap belum memenuhi standar kualifikasi walaupun jika dilihat dari segi kompetensi sudah memenuhi kriteria.

- d. Belum sinkronnya serta belum dilakukan update data kependudukan dengan data di dalam DAPODIK, sehingga berdampak pada tidak validnya data jumlah siswa sekolah pada jenjang pendidikan tertentu;
- e. Belum adanya harmonisasi data antara kementerian pendidikan dengan kementerian agama untuk siswa yang bersekolah di satuan pendidikan di kewenangan masing-masing lembaga;
- f. Belum tersedianya *by name by address anak putus* sekolah yang akan di intervensi di dalam pendidikan kesetaraan.

2.2. BIDANG URUSAN KESEHATAN

a. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan kesehatan yang diperoleh Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2023 dan 2024

No.	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Rumus	Capaian 2023	% Kinerja	Capaian 2024	% Kinerja
1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan di kabupaten/kota	244,00	0,11	247,00	1,13
		Jumlah penduduk di kabupaten/kota	214.428,00		217.859,00	
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Jumlah RS rujukan yang terakreditasi	3,00	100,00	3,00	100,00
		Jumlah RS di kabupaten/kota	3,00		3,00	
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	3.250,00	100,00	2.660,00	90,20
		Jumlah ibu hamil di kabupaten/kota	3.250,00		2.949,00	
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan	3.291,00	100,00	2.919,00	98,98
		Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota	3.291,00		2.949,00	

No.	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Rumus	Capaian 2023	% Kinerja	Capaian 2024	% Kinerja
5	Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	3.254,00	100,00	2.891,00	99,11
		Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota	3.254,00		2.917,00	
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	10.873,00	100,00	10.382,00	95,59
		Jumlah balita di kabupaten/kota	10.873,00		10.861,00	
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	36.522,00	100,00	36.866,00	98,87
		Jumlah anak pendidikan dasar di kabupaten/kota	36.522,00		37.289,00	
8	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-29 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	113.633,00	100,00	122.811,00	85,99
		Jumlah orang usia 15-29 tahun di kabupaten/kota	113.633,00		142.826,00	
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	16.511,00	100,00	17.347,00	87,61
		Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas di kabupaten/kota	16.511,00		19.800,00	

No.	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Rumus	Capaian 2023	% Kinerja	Capaian 2024	% Kinerja
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	47.040,00	100,00	49.749,00	94,87
		Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota	47.040,00		52.437,00	
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	4.152,00	100,00	4.288,00	100,00
		Jumlah penderita DM di kabupaten/kota	4.152,00		4.288,00	
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	503,00	100,00	530,00	100,00
		Jumlah penderita ODGJ di kabupaten/kota	503,00		530,00	
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	3.070,00	100,00	3.182,00	100,00
		Jumlah penderita TBC di kabupaten/kota	3.070,00		3.182,00	
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	5.152,00	100,00	3.566,00	96,35
		Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten/kota	5.152,00		3.701,00	

b. Realisasi Belanja Urusan Kesehatan

Realisasi belanja urusan kesehatan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Realisasi Anggaran Urusan Kesehatan Tahun 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN
II.	KESEHATAN				1.532.013.526,00
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<p>Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil</p> <p>Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin</p> <p>Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita</p> <p>Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar</p> <p>Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif</p> <p>Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut</p> <p>Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi</p> <p>Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus</p> <p>Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat</p> <p>Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis</p> <p>Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV</p>	<p>Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil</p> <p>Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin</p> <p>Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir</p> <p>Pelayanan Kesehatan Balita</p> <p>Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar</p> <p>Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif</p> <p>Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut</p> <p>Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi</p> <p>Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi</p> <p>Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus</p> <p>Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat</p> <p>Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat</p> <p>Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis</p>	<p>337.685.000</p> <p>38.615.000</p> <p>11.175.000</p> <p>1.330.000</p> <p>300.000</p> <p>24.748.000</p> <p>310.000</p> <p>363.051.600</p> <p>675.000</p> <p>633.623.926</p> <p>120.500.000</p>

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN
				Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	

c. Permasalahan yang dihadapi

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan bidang kesehatan, baik permasalahan eksternal maupun internal antara lain yaitu:

- a. Masih terbatas tenaga medis khususnya dokter dalam melakukan pelayanan penjangkauan di masyarakat serta belum sesuainya ketersediaan tenaga medis pada Puskesmas dengan intensitas pelayanan kepada masyarakat yang akan dilakukan;
- b. Masih terbatasnya program dan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan di masyarakat berkaitan dengan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat yang melibatkan lintas sector dalam mendorong masyarakat untuk mengunjungi fasilitas Kesehatan/ posbindu/ posyandu yang ada di desa sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
- c. Masih ditemukan belum keseragaman dalam pengalokasian kebutuhan besaran biaya transport kader yang ada di desa ;
- d. Masih adanya kesenjangan antara luas wilayah dengan kapasitas pegawai dalam melakukan pelayanan kesehatan

2.3. BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM

a. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan Pekerjaan Umum yang diperoleh Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2023 dan 2024

No.	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Rumus	Capaian 2023	% Kinerja	Capaian 2024	% Kinerja
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan kabupaten/kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan kabupaten/kota (ha)	129,49	57,01	152,04	66,94
		Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	227,14		227,14	
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota	Luas kawasan permukiman rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota (ha)	2.869,00	67,00	29,48	62,43
		Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	4.282,00		47,22	
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan yang dibangun (ha) ditingkatkan (ha) dioperasikan dan pelihara (ha)	1.117,00	52,54	1.005,50	47,30
		luas daerah irigrasi kewenangan kabupaten kota	2.126,00		2.126,00	

No.	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Rumus	Capaian 2023	% Kinerja	Capaian 2024	% Kinerja
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota	55.790,00	92,96	64.870,00	93,93
		Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut	60.016,00		69.065,00	
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya di olah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD	58.624,00	97,68	58.812,00	97,99
		Jumlah rumah di kabupaten/ kota	60.016,00		60.016,00	
6	Rasio kepatuhan IMB kabupaten/ kota	Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya	2.942,00	100,00	3.004,00	100,00
		Jumlah IMB yang berlaku	2.942,00		3.004,00	
7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Panjang jalan kewenangan provinsi yang mantap	554,79	68,55	599.798,00	74,11
		Panjang jalan keseluruhan di wilayah kabupaten/kota	809,31		809.305,00	

No.	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Rumus	Capaian 2023	% Kinerja	Capaian 2024	% Kinerja
8	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga konstruksi yang terlatih di wilayah kab kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/ analis	309,00	56,18	297,00	98,02
		Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah kabupaten/kota	550,00		303,00	
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100,00	100,00	59,00	100,00
		jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	100,00		59,00	

b. Realisasi Belanja Urusan Pekerjaan Umum

Realisasi belanja urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Realisasi Anggaran Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2024

I	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN
III	PEKERJAAN UMUM				2,796,735,000
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	1,367,876,000
			Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		13,346,000

1	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN
			Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		790,100,000
			Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		450,700,000
			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		113,730,000
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	1,428,859,000
			Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja		170,309,000
			Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)		158,000,000
			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)		109,050,000
			Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat		841,500,000
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)		150,000,000

c. Permasalahan yang dihadapi

Dalam pelaksanaan kinerja di bidang Pekerjaan Umum tentunya memiliki beberapa permasalahan yang di hadapi oleh Dinas teknis. Adapun untuk permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan lahan untuk sanitasi sesuai standar;
2. Alokasi Biaya operasional serta sumber daya masyarakat sebagai kelompok pengelola yang belum optimal;
3. Belum adanya perubahan mindset masyarakat dalam mengelola air limbah dengan menggunakan SPALD;
4. Masih terbatasnya ketersediaan air baku yang dapat dimanfaatkan untuk penyediaan air di SPAM di masing-masing wilayah;
5. Air baku disebagain di wilayah tidak tercukupi sehingga terancam ketersediaannya;
6. Banyaknya kegiatan penambangan timah yang berdampak pada kualitas air baku;
7. Belum optimalnya ketersediaan database;
8. Tidak selarasnya antara penetapan target dengan ketersediaan anggaran yang dimiliki;

2.4. BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

a. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan Perumahan Rakyat yang diperoleh Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7
Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2023 dan 2024

No.	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Rumus	Capaian 2023	% Kinerja	Capaian 2024	% Kinerja
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2020	15,00	100,00	10,00	100,00
		jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2019	15,00		10,00	
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Rumah tangga penerima fasilitas penggantian hak atas penguasaan tanah dan atau bangunan+rumah tangga penerima subsidi uang sewa+rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni	1,00	100,00	0	0,00

No.	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Rumus	Capaian 2023	% Kinerja	Capaian 2024	% Kinerja
		Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima layanan	1,00		1,00	
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)	4,79	50,32	4,92	27,58
		Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha	9,52		17,84	
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah tidak layak huni	3.039,00	6,07	2.784,00	4,58
		Jumlah total unit rumah kabupaten/kota	50.058,00		60.016,00	
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit perumahan yang sedang dibangun terfasilitasi PSU	77,00	26,37	77,00	26,37
		Jumlah unit perumahan kabupaten/kota	292,00		292,00	

b. Realisasi Belanja Urusan Perumahan Rakyat

Realisasi belanja urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8
Realisasi Anggaran Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN
IV	PERUMAHAN RAKYAT				447,000,000
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak huni bagi Korban Bencana	112,000,000
			Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan		105,000,000

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN
			Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani		1,000,000
			Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		2,500,000
			Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		500,000
			Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		2,500,000
			Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		500,000
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten	335,000,000
			Rehabilitasi rumah bagi korban bencana		214,500,000
			Pembangunan rumah bagi korban bencana		120,500,000

c. **Permasalahan yang dihadapi**

Dalam pelaksanaan kinerja di bidang Perumahan Rakyat tentunya memiliki beberapa permasalahan yang di hadapi oleh Dinas teknis. Adapun untuk permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a. Masih belum tersedianya dokumen kajian risiko bencana yang mencakup seluruh kecamatan di Kabupaten Bangka barat yang secara langsung berdampak pada penetapan daerah rawan bencana;
- b. Perlu adanya sinkronisasi data hasil identifikasi lokasi rawan bencana yang telah dilakukan oleh dinas perumahan kawasan permukiman dan perhubungan terkait dengan identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana dengan dokumen kebencanaan yang telah tersedia;
- c. Perlu adanya penyempurnaan kembali terhadap dokumen hasil identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana serta identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi.
- d. Perlu adanya peningkatan pemahaman aparaturnya di dalam pelaksanaan indikator relokasi sesuai dengan tata cara yang terdapat pada peraturan perundang-undangan.

2.5. BIDANG URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

a. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang diperoleh Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.9
Capaian Kinerja Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2023 dan 2024

No.	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Rumus	Capaian 2023	% Kinerja	Capaian 2024	% Kinerja
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang ditangani	24,00	100,00	15,00	100,00
		Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk	24,00		15,00	
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan	7,00	100,00	7,00	100,00
		Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi	7,00		7,00	
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	71.542,00	80,74	100.904,00	95,51
			88.610,00		105.652,00	
4	Jumlah warga negara yang	Jumlah warga negara yang	1.635,00	66,60	1.872,00	76,25

No.	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Rumus	Capaian 2023	% Kinerja	Capaian 2024	% Kinerja
	memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	2.455,00		2.455,00	
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1.675,00	100,00	795,00	100,00
			1.675,00		795,00	
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat daerah + Jumlah layanan pemadaman di kab/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah	10,00	100,00	1,00	100,00
		Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota	10,00		1,00	

No.	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Rumus	Capaian 2023	% Kinerja	Capaian 2024	% Kinerja
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	9,06	9,06	7,00	7,00

b. Realisasi Belanja Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Realisasi belanja urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.10
Realisasi Anggaran Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN
V	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)				6.937.500.000
		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam I (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			4.674.910.000
			Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	692,360,000
			Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia		3,693,800,000
			Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum		27,360,000
		Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa			163.065.000

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		33.850.000
			Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		62,450,000
			Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		2.025.000
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)				1.287.645.000
					212.850.000
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	200.000.000
			Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)		12,850,000
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			1,001,225,000
			Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	15.000.000
			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota		34.430.000
			Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota		944,345,000
			Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana		7,450,000
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	72,990,000
			Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota		68,680,000
			Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota		4,310,000
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota		280.000	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN
			Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota		4.310.000
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			974.945.000
			Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	23,945,000
			Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota		166,280,000
			Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran		520,820,000
			Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri		90,000,000
			Pembinaan aparaturnya pemadam kebakaran		10.000.000
			Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri		163,900,000

c. **Permasalahan yang dihadapi**

Dalam pelaksanaan kinerja di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum tentunya memiliki beberapa permasalahan yang di hadapi oleh Dinas teknis. Adapun untuk permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a. Masih ada kegiatan yang belum diakomodir untuk mencapai target Standar Pelayanan Minimal dikarenakan keterbatasan anggaran ;
- b. Belum tersedianya dokumen –dokumen penanganan daerah rawan bencana secara menyeluruh yang terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu kajian resiko bencana, dokumen penanggulangan bencana serta dokumen rencana kontigensi dipergunakan dalam identifikasi perumahan dilokasi rawan bencana dan lahan – lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan;
- c. Masih terbatasnya sarana prasarana dan personil untuk mendukung pencapaian SPM di mana jika merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum di setiap

kecamatan harus ada personil Polisi Pamong Praja serta harus ada UPT Kebakaran di setiap kecamatan.

2.6. BIDANG URUSAN SOSIAL

a. Capaian Kinerja Outcome

Dalam pelaksanaan kinerja di bidang Sosial tentunya memiliki beberapa permasalahan yang di hadapi oleh Dinas teknis. Adapun untuk permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

Tabel 2.II
Capaian Kinerja Urusan Sosial Tahun 2023 dan 2024

No.	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Rumus	Capaian 2023	% Kinerja	Capaian 2024	% Kinerja
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	19,00	100,00	271,00	100,00
		Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	19,00		271,00	
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran	568,00	100,00	468,00	100,00
		populasi korban bencana alam dan sosial yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten kota	568,00		468,00	

b. Realisasi Belanja Urusan Sosial

Realisasi belanja urusan Sosial Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.12
Realisasi Anggaran Urusan Sosial Tahun 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN
VI	SOSIAL				690.687.000,-
1.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			612.837.000,-
			Penyediaan permakanaan	rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	184.645.000,-
			Penyediaan sandang	rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	130.540.000,-
			Penyediaan alat bantu	rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	18.652.000,-
			Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	25.000.000,-
			Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial		44.370.000,-
			Pemberian bimbingan social kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat		54.050.000,-
			Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak		300.000,-
			Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar		20.000.000,-

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN
			Pemberian layanan data dan pengaduan		300.000,-
			Pemberian layanan kedaruratan		30.000.000,-
			Pemberian pelayanan penelurusan keluarga		10.000.000,-
			Pemberian layanan rujukan		95.000.000,-
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			77.850.000,-
			Penyediaan makanan	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	47.250.000,-
			Penyediaan sandang		10.300.000,-
			Penyediaan tempat penampungan pengungsi		0
			Penanganan khusus bagi kelompok rentan		10.300.000,-
			Pelayanan dukungan Psikososial		10.000.000,-

c. Permasalahan yang dihadapi

Dalam pelaksanaan kinerja di bidang Sosial tentunya memiliki beberapa permasalahan yang di hadapi oleh Dinas teknis. Adapun untuk permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya kinerja pekerja sosial dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikarenakan banyaknya tugas tambahan yang dibebankan kepada mereka di luar tugas fungsi pokoknya;
- b. Masih minimnya sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelayanan sosial.
- c. Masih tumpang tindihnya tugas dan fungsi pekerja sosial masyarakat di lapangan yang dianggap tidak hanya melayani urusan sosial saja, sehingga berdampak pada belum optimalnya penyediaan data kesejahteraan sosial.

2. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) dan Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023

3.1. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) Tahun 2023

Adapun untuk hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintah Daerah Tahun 2023 sampai dengan saat ini belum dikeluarkan oleh pihak Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal otonomi Daerah sehingga untuk hasil evaluasi terakhir masih menggunakan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 yang lalu. Berdasarkan hasil Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.7-6646 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional Tahun 2023 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022, Kabupaten Bangka Barat berada di *posisi 104* dari 414 Kabupaten yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memperoleh *skor nilai sebesar 3,1430* dengan status *kinerja sedang*.

3.2. Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023

Berdasarkan Laporan Nomor dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 89.B/LHP/XVIII.PPG/07/2024 tentang Hasil Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2023, Kabupaten Bangka Barat mendapatkan opini *Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)* atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2023, yang berarti laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat telah menyajikan data secara wajar baik dalam hal material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tertentu telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

3. Ringkasan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Daerah

Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat menyelenggarakan urusan desentralisasi yaitu 32 urusan Pemerintahan daerah yang terdiri dari urusan wajib yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar dan urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Urusan desentralisasi yang dilaksanakan pada tahun 2024 terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar dan urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan total belanja sebesar Rp.1.080.116.362.306,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp.827.112.140.756, Belanja Modal sebesar Rp. 131.477.791.830,00 Belanja Tak Terduga sebesar Rp. 774.220.000,00 dan Belanja Transfer sebesar Rp.120.752.209.720 dengan total realiasi belanja sebesar Rp974.19.070.516,87 atau 90,20%, yang terdiri dari realisasi Belanja Operasi sebesar Rp.746.410.478.657,23 (90,24%), realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 107.059.382.139,64 (81,43%) realisasi Belanja Tak Terduga sebesar Rp. 0,00 (0%) dan realisasi Belanja Transfer sebesar Rp. 120.752.209.720 (100%).

Sedangkan untuk pendapatan daerah, pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat memiliki anggaran pendapatan daerah sebesar Rp 1.023.453.390.292,30 yang terdiri dari Pendapatan

Asli Daerah (PAD) dengan anggaran sebesar Rp 95.825.7693.123,19 Pendapatan Transfer dengan anggaran sebesar Rp 923.317.621.169,11 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan total anggaran sebesar Rp 4.310.000.000,00 Sedangkan total realisasi pendapatan daerah pada tahun 2024 ini sebesar Rp. 931.616.821.536,08 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah dengan realisasi sebesar Rp 86.657.087.677,08 atau sebesar 90,43%, Pendapatan Transfer dengan realisasi sebesar Rp 840.905.403.685 atau 91,07% dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan realisasi sebesar Rp 4.054.330.174 atau sebesar 94,07%.

Tabel 4.1
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH	1,023,453,390,292.30	931,616,821,536.08	91.03
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	95,825,769,123.19	86,657,087,677.08	90.43
4.1.01	Pajak Daerah	34,250,000,000.00	32,340,169,274.00	94.42
4.1.02	Retribusi Daerah	15,457,241,681.19	15,032,696,814.68	97.25
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7,545,000,000.00	5,966,951,097.57	79.08
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	38,573,527,442.00	33,317,270,490.83	86.37
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	95,825,769,123.19	86,657,087,677.08	90.43
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	923,317,621,169.11	840,905,403,685.00	91.07
4.2.01.01	Dana Perimbangan	809,530,394,436.00	727,730,577,985.00	89.90
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	206,744,750,436.00	142,412,998,000.00	68.88
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	477,599,585,000.00	468,444,230,163.00	98.08
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	28,616,482,000.00	27,199,075,265.00	95.05
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	96,569,577,000.00	89,674,274,557.00	92.86
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	809,530,394,436.00	727,730,577,985.00	89.90
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	0.00	0.00	0.00
4.2.01.05	Dana Desa	54,949,231,000.00	54,949,231,000.00	100.00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	7,152,766,000.00	7,152,766,000.00	100.00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	62,101,997,000.00	62,101,997,000.00	100.00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	51,685,229,733.11	51,072,828,700.00	98.82
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	51,685,229,733.11	51,072,828,700.00	98.82
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	51,685,229,733.11	51,072,828,700.00	98.82

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024
	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER	923,317,621,169.11	840,905,403,685.00	91.07
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	4,310,000,000.00	4,054,330,174.00	94.07
4.3.01	Pendapatan Hibah	0.00	0.00	0.00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4,310,000,000.00	4,054,330,174.00	94.07
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	4,310,000,000.00	4,054,330,174.00	94.07
	JUMLAH PENDAPATAN	1,023,453,390,292.30	931,616,821,536.08	91.03
5	BELANJA DAERAH	1,080,116,362,306.00	974,219,070,516.87	90.20
5.1	BELANJA OPERASI	827,112,140,756.00	746,410,478,657.23	90.24
5.1.01	Belanja Pegawai	426,183,197,744.00	412,676,783,361.00	96.83
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	344,222,671,372.00	283,275,145,984.23	82.29
5.1.05	Belanja Hibah	50,579,011,640.00	44,994,954,850.00	88.96
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	6,127,260,000.00	5,463,594,462.00	89.17
	JUMLAH BELANJA OPERASI	827,112,140,756.00	746,410,478,657.23	90.24
5.2	BELANJA MODAL	131,477,791,830.00	107,059,382,139.64	81.43
5.2.01	Belanja Modal Tanah	700,000,000.00	0.00	0.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22,443,143,417.00	20,170,550,842.00	89.87
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	35,058,178,921.00	32,599,542,695.00	92.99
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	66,807,113,161.00	48,440,286,471.64	72.51
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6,469,356,331.00	5,849,002,131.00	90.41
	JUMLAH BELANJA MODAL	131,477,791,830.00	107,059,382,139.64	81.43
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	774,220,000.00	0.00	0.00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	774,220,000.00	0.00	0.00
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	774,220,000.00	0.00	0.00
5.4	BELANJA TRANSFER	120,752,209,720.00	120,749,209,720.00	100.00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	3,331,739,920.00	3,331,739,920.00	100.00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	851,700,000.00	851,700,000.00	100.00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	116,568,769,800.00	116,565,769,800.00	100.00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	120,752,209,720.00	120,749,209,720.00	100.00
	JUMLAH BELANJA	1,080,116,362,306.00	974,219,070,516.87	90.20

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024
	SURPLUS/DEFISIT	(56,662,972,013.70)	(42,602,248,980.79)	75.19
6	PEMBIAYAAN DAERAH	56,662,972,013.70	56,592,472,013.70	99.88
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	56,662,972,013.70	56,592,472,013.70	99.88
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	56,562,972,013.70	56,562,972,013.70	100.00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	100,000,000.00	29,500,000.00	29.50
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	56,662,972,013.70	56,592,472,013.70	99.88
	PEMBIAYAAN NETTO	56,662,972,013.70	56,592,472,013.70	99.88
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0.00	13,990,223,032.91	0.00

4. Inovasi Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 2017, inovasi daerah merupakan semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, berdasarkan prinsip peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak menimbulkan konflik kepentingan, beroreantasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri. Secara umum inovasi daerah juga dapat diartikan sebagai semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk meningkatkan kinerjanya. Hal ini perlu dilaksanakan karena sasaran dari inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan juga peningkatan daya saing daerah. Adapun bentuk dari inovasi daerah berupa inovasi tata kelola pemerintahan, inovasi kebijakan publik, dan juga inovasi daerah lainnya yang sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam era global, pembangunan perlu lebih mengedepankan aspek pemanfaatan Iptek dan inovasi sebagai faktor pembentuk daya saing. Pertumbuhan pembangunan perlu digerakkan oleh strategi yang tidak saja semakin efisien, namun mengedepankan inovasi dengan mendayagunakan Iptekin. Hal tersebut senada dengan semangat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen IV) pada pasal 31 ayat 5 yang menyatakan bahwa “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”.

Sebagai pelaksana ketentuan tersebut, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang mengamanatkan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memperkuat daya dukung Iptek dalam meningkatkan daya saing dan kemandirian bangsa menghadapi persaingan global. Kemudian sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa inovasi menjadi salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inovasi menentukan tingginya daya saing suatu daerah/negara.

Untuk menjalankan prinsip prinsip Inovasi Daerah tersebut, peran Organisasi Perangkat Daerah dibutuhkan guna menerapkan solusi solusi kreativitas terhadap masalah dan peluang yang ada di suatu wilayah, mengenai bentuk inovasi daerah sebagaimana tercantum pada pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 2017 antara lain sebagai berikut:

1. Inovasi tata Kelola pemerintah daerah merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintah Daerah, yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen atau pengelolaan unsur manajemen.
2. Inovasi pelayanan publik, dan/atau merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik
3. Inovasi daerah lainnya merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah

Terkait dengan inovasi daerah ini untuk tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat memiliki beberapa inovasi daerah yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Desa dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, peningkatan daya saing Daerah. Banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah berpartisipasi dalam inovasi daerah ini sehingga diharapkan dapat semakin meningkatkan kinerja dan pelayanan daerah dalam berbagai lini sektor. Berikut disajikan berbagai inovasi daerah yang ada di Kabupaten Bangka Barat :

Tabel 5.1
Inovasi Daerah di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024

No	Pelaksana inovasi daerah	Judul inovasi daerah	Keterangan
1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Si Jempol Panday Babar	Digital
2	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Sistem Informasi Digital Melayani Cuti Aparatur Sipil Negara (SIDILANCUTI ASN)	Digital
3	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Siperkasa	Digital
4	Kecamatan Mentok	Camat Rapih	Non Digital
5	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Pantasi	Non Digital
6	Kecamatan Jebus	Layanan Digital Administrasi Publik Di Kecamatan Jebus (Ladimin Jebus)	Digital
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Bumdesa Corners Sekolah Ubok Sekicing	Digital
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	'P4GN Beraksi' (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika melalui Pemberdayaan dan Kolaborasi)	Non Digital

No	Pelaksana inovasi daerah	Judul inovasi daerah	Keterangan
9	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Sipenagur	Digital
10	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Nubar Kelekak	Non Digital
11	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	KurMa BeranTu (Kurban Massal Bersama Orang Tua)	Non Digital
12	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Aktivis Pelestari Pucuk Idat	Non Digital
13	Kecamatan Parittiga	SI PARTI WA (Sistem Informasi dan Pelayanan Administrasi Parittiga dengan Aplikasi Whatsapp)	Digital
14	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	Penambahan Kanal Bayar Non Tunai Virtual Account dan E-Commerce	Digital
15	Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak ,Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	SI PENJAGA ANAK (SInergi PENcegahan, penJamin penanGANan kasus kekerasan ANAK)	Non Digital
16	Kecamatan Simpang Teritip	Optimalisasi Pengelolaan Arsip Surat Tanah Melalui Digitalisasi (SIKUNDI)	Digital
17	Kecamatan Simpang Teritip	Peningkatan Pengelolaan Kearsipan Melalui Sistem Informasi Jelas, Rasional, Inovatif, Elaboritas, Normatif Dan Gemilang (Si Jerieng)	Digital
18	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pelanduk Sakti	Non Digital
19	Kecamatan Kelapa	Sistem Layanan Berbasis Whatsapp (SAYA BISA)	Digital
20	Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak ,Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Si Gasing Melanting (Siap Cegah Stunting Melalui Layanan Konseling)	Non Digital
21	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	SITUKANG INFO (Sistem Terpadu Kerjasama Penanganan dan Informasi Penegakan Perda dan Perkada)	Teknologi
22	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Inovasi Kebudayaan	Non Digital
23	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Cikgu Babar	Non Digital
24	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Pakguruujang	Digital
25	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Aplikasi Android Bertimah	Digital



**SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT**

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Barat